

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gereja Katolik sebagai organisasi sektor publik non pemerintah di bidang keagamaan mendapat tantangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Konferensi Waligereja Indonesia di Jakarta tanggal 15 Juli 2017, anggota senior KPK menantang gereja Katolik untuk melakukan audit keuangan demi mendorong transparansi dan akuntabilitas. Beberapa keuskupan di Indonesia telah menerapkan supervisi ke paroki secara rutin. Keseluruhan pengelolaan keuangan di tubuh gereja perlu dilakukan audit untuk memenuhi hak umat atau pengikut Gereja dan pihak berkepentingan lainnya. Sejumlah keuskupan di Indonesia yang menerapkan supervisi secara rutin dibuktikan dengan hadirnya tim supervisi yang mendatangi paroki-paroki untuk melihat tata administrasi dan tata kelola keuangan Keuskupan (KPK Tantang Gereja untuk Audit Keuangan, dikutip dari UCAN News Indonesia, 2017).

Praktik supervisi atas pelaksanaan pelayanan pastoral di paroki-paroki juga dilakukan beberapa Keuskupan di Indonesia untuk memastikan bahwa pelayanan bagi umat dijalankan dengan semestinya. Secara kanonis, pelaksanaan supervisi ini

menjadi tanggung jawab Uskup diosesan dan dibantu oleh orang-orang yang dipilih oleh Uskup (bdk KHK Kanon 392 dan Kanon 511) (Gitowiratmo, 2015).

Gitowiratmo (2015) dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam dekade terakhir ini penerapan prinsip-prinsip manajerial sedang menjadi tren dalam lembaga-lembaga Katolik. Hal ini disebabkan dugaan jika gereja Katolik dianggap tidak transparan dan tertutup terhadap praktik manajemen modern karena kuatnya pengaruh para pemimpin dan tradisi dalam organisasi gereja. Banyak pimpinan Keuskupan di Indonesia yang memandang perlu untuk mengembangkan pola tata kelola Keuskupan berdasarkan pada pokok-pokok manajerial, yaitu menempatkan visi-misi sebagai pemandu kinerja organisasi atau kelembagaan, azas transparansi dan akuntabilitas, berkembang tata kelola harta benda gerejawi yang menurut Hukum Kanon, sumber daya manusia yang terlibat dan bertanggung jawab untuk kelancaran pelayanan gereja dan keberlangsungannya, praktik manajerial yang dilakukan oleh tarekat-tarekat hidup bakti dan melalui karya-karya nyata, tarekat-tarekat berusaha untuk menterjemahkan spiritualitas tarekat dan kharisma pendiri mereka dalam bentuk yang konkrit.

Sebagai organisasi nirlaba, pelaporan keuangan gereja Katolik berpedoman pada PSAK 45 yang mengatur tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Mahsun dkk, 2013). Gereja sebagai lembaga pelayanan yang mengambil spiritualitas dan religiusitas Injili sebagai dasar hidupnya, bertanggungjawab untuk mewujudkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang melatarbelakangi konsep transparansi dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas telah dipraktikkan Keuskupan Agung Semarang

(KAS) dengan melahirkan sebuah cara tata kelola keuangan paroki dengan menggunakan model standar akuntansi tertentu untuk kepentingan lembaga nirlaba. Penggunaan standar akuntansi itu diikuti dengan serangkaian pedoman tata kelola keuangan umat atau paroki yang muaranya adalah iklim transparan dan akuntabel (Gitowiratmo, 2015). Standar akuntansi paroki milik KAS diatur dalam Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP), sedangkan hal yang bersifat teknis terkait dengan pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) (Pramudya, 2010).

Dalam PKAP KAS Bab III Pasal 5 mengenai Kewajiban Paroki dalam Hal Keuangan, tertulis bahwa Paroki wajib menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dengan standar yang ditentukan oleh Keuskupan Agung Semarang. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam PTKAP halaman 3, tertulis bahwa acuan yang digunakan dalam penyusunan PTKAP didasarkan pada acuan yang relevan salah satunya adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IPSAK). Prosedur pencatatan keuangan pun dilakukan secara bertahap dengan adanya pemisahan tugas, pencatatan yang tertulis dalam PKAP diantaranya pencatatan penerimaan hasil kolekte, persembahan bulanan umat, pengeluaran biaya tim kerja, dan biaya kepanitiaan. Dengan mengacu pada PSAK 45 yang khusus mengatur standar pelaporan keuangan entitas nirlaba, dapat dikatakan bahwa PKAP dan PTKAP yang diterapkan oleh KAS mendukung terwujudnya standar pelaporan

laporan keuangan entitas nirlaba yang lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Sejumlah penelitian mengenai akuntabilitas organisasi nirlaba, khususnya organisasi keagamaan dapat ditemukan dalam jurnal-jurnal penelitian akuntansi di Indonesia. Penelitian mengenai prinsip akuntabilitas organisasi gerejawi Indonesia telah dilakukan oleh Silvia dan Ansar (2011), Randa (2011), dan Simanjuntak dan Januarsi (2011). Pada penelitian Randa (2011) yang menggunakan metode etnografi kritis inkulturatif dengan pendekatan interpretif, konsep dan pemaknaan dari praktik akuntabilitas dalam Gereja Katolik di Tana Toraja menemukan kesimpulan bahwa terdapat tiga dimensi utama dalam praktik akuntabilitas yaitu akuntabilitas spiritual, kepemimpinan, dan keuangan. Ketiga kategori ini muncul dalam setiap jenjang organisasi baik pada Stasi, Paroki maupun Keuskupan. Praktik akuntabilitas spiritual dalam Stasi, diwujudkan dalam bentuk mengikuti ibadah hari Minggu, mengikuti doa-doa keluarga, memberikan persembahan kepada gereja, dan memilih panggilan hidup bakti. Pemaknaan dari akuntabilitas kepemimpinan pada gereja Katolik di Tana Toraja ditunjukkan dengan model kepemimpinan yang berusaha mengedepankan unsur pelayanan, namun terjadi kecenderungan pengelolaan organisasi yang sentralistik untuk mengamankan ajaran Kristologi dan mengabaikan dimensi pneumatologi yang mengedepankan unsur kolegialitas dan keterlibatan umat (Randa, 2011).

Hasil yang berbeda terlihat dari hasil pemaknaan akuntabilitas keuangan. Pada tingkat Stasi, pengelolaan dana stasi dan dana pembangunan telah

dipertanggungjawabkan kepada umat secara transparan dengan mengumumkan seluruh penerimaan dan pengeluaran di Gereja setiap hari Minggu. Di tingkat Paroki sebagai perpanjangan tangan Keuskupan (agen) dan menjadi penanggungjawab gereja, proses pengelolaan dana paroki sepenuhnya menjadi kewenangan Pastor Paroki dan Pastor Paroki belum menyajikan laporan keuangan kepada prinsipal maupun kepada *stakeholder* (Randa, 2011).

Di tingkat Keuskupan yang berperan sebagai prinsipal bagi Paroki setempat juga sebagai agen bagi Gereja induk di Roma, Keuskupan Agung Makassar (KAMS) mengelola lima jenis dana yaitu dana subsidi Roma, dana solidaritas Paroki, dana Mgr. Lumanauw (untuk kebutuhan pendidikan calon imam), dana Aksi Puasa Pembangunan, dan dana hasil usaha. Dalam mengelola keuangan, Keuskupan telah menghasilkan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya memenuhi syarat kualitatif sebuah laporan keuangan karena tidak adanya pemisahan fungsi yang menyebabkan Ekonom menjadi otorisator tunggal transaksi keuangan (Randa, 2011). Fakta ini membuktikan bahwa gereja Katolik di Tana Toraja belum sepenuhnya patuh terhadap PSAK 45 atau standar pelaporan keuangan khusus yang mengatur pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi keagamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan Ansar (2011) dengan studi fenomenologi pada Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) Jemaat Manunggal Palu, menghasilkan suatu kesimpulan konsep akuntabilitas di Gereja Protestan dilakukan dengan cara gereja meyakinkan kepercayaan jemaat yaitu dengan menyediakan laporan keuangan dalam warta jemaat agar menghilangkan

kecurigaan jemaat terhadap pengelola keuangan, walaupun demikian masih ada jemaat yang berpikiran buruk pada pengelola keuangan Gereja. Hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa "ketidakberesan" administrasi terjadi karena antara jemaat dan majelis tidak saling menopang atau dapat dikatakan tidak ada kebersamaan.

Penelitian Simanjuntak dan Januarsi (2011) yang dilakukan dengan studi kasus pada Masjid Baitusalam di Kabupaten Tangerang, memperoleh hasil dalam konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan keuangan Masjid serta perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Sayangnya, argumentasi akuntansi sebagai bagian integral dari pemahaman teologi Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah sebagai muslim justru dibangun oleh landasan untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan citra kepemimpinan para pengurus Masjid sebagai orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam lainnya (Simanjuntak dan Januarsi, 2011). Masjid sebagai organisasi keagamaan atau organisasi tempat ibadah termasuk dalam organisasi nirlaba. Oleh sebab itu, perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangannya mengacu pada PSAK 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba (Halim dan Kusufi, 2014).

Penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Januarsi (2011), menemukan bahwa laporan keuangan Masjid dilakukan sangat sederhana yaitu menggunakan empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Penyusunan laporan keuangan

hanya dilakukan oleh ketua dan bendahara Masjid. Pelaporannya pun tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Hal ini mendorong Ustaz dan pengelola keuangan Masjid menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk membuat model penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan Masjid, sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh jama'ah masjid dapat terpenuhi (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Pada penelitian Randa (2011), peneliti mengangkat studi etnografi inkulturatif pada gereja di Tanah Toraja sebagai jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan rekonstruksi konsep akuntabilitas. Rekonstruksi inkulturatif ini digunakan oleh peneliti agar dapat membangun organisasi Gereja yang lebih akuntabel dengan menerima nilai-nilai akuntabilitas dalam budaya lokal menjadi bagian dari konsep akuntabilitas Gereja dalam kesatuan dengan Gereja universal (Randa, 2011). Praktik akuntabilitas dalam gereja Katolik lokal yang masih menjalankan tradisi lokal mulai menjadi perhatian gereja universal. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan sendiri didefinisikan oleh Geertz (1973) dalam Santoso (2013) sebagai suatu sistem simbol. Oleh sebab itu, kebudayaan hanya bisa dimengerti melalui pemaknaan dan untuk memahami makna dari suatu kebudayaan maka seseorang harus dapat menafsirkan simbol-simbol yang dipergunakan oleh seseorang (Santoso, 2013). Inkulturasi adalah suatu proses menghadirkan ajaran dan “budaya” Kristen ke dalam masyarakat yang telah lebih dulu memiliki latar belakang budaya dan sistem kepercayaan sendiri (Santoso, 2013).

Konsep inkulturasi mulai menjadi perhatian Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II tahun 1962-1965. Disebutkan dalam Randa (2011), pada Surat Himbauan Apostolik Paus Yohanes Paulus II, *Redemptoris Missio* (RM), tertulis bahwa inkulturasi adalah suatu transformasi nilai-nilai kebudayaan otentik secara mendalam melalui proses integrasi ke dalam kekristenan dan meresapkan kekristenan ke dalam berbagai kebudayaan umat manusia. Inkulturasi adalah istilah yang berasal dari teologi misi, dipopulerkan oleh seorang misiolog asal Belgia bernama Joseph Mason tahun 1959. Inkulturasi berhubungan dengan kosakata antropologi: *enkulturasi* (penyesuaian seseorang ke dalam suatu budaya tertentu) dan *akkulturasi* (pertemuan antar budaya dan penerimaan unsur-unsur budaya dari suatu budaya asing). Inkulturasi awalnya adalah suatu istilah yang dipergunakan oleh lingkungan Katolik. Lalu, pada sinode para Uskup tahun 1977, istilah inkulturasi diterima dan digunakan dalam suatu dokumen resmi Gereja (Martasudjita, 2005). Inkulturasi budaya merupakan konsep yang khusus digunakan gereja Katolik untuk menggambarkan sebuah upaya gereja dalam membangun hubungan yang harmonis dengan budaya lokal. Konsep inkulturasi ini digunakan untuk menemukan kesamaan nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Kristiani. Diharapkan inkulturasi yang dilakukan oleh Gereja Katolik dapat mengakomodir nilai-nilai budaya lokal yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu serta uraian hasil penelitian yang cukup beragam, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prinsip Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Paroki (Studi Etnografi Inkulturatif**

pada **Gereja Katolik Lokal di Larantuka**)”. Objek penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Randa (2011) yang dilakukan pada gereja Katolik lokal di Tana Toraja. Peneliti ingin melanjutkan penelitian yang pernah ada dan memilih salah satu Paroki lokal yang berada dalam lingkup Keuskupan Larantuka. Pemilihan objek penelitian dilakukan pada gereja Katolik lokal di Larantuka dengan pertimbangan seperti (1) Masyarakat daerah Larantuka sebagian besar memeluk agama Kristiani yaitu Protestan dan Katolik, (2) Gereja Katolik di Larantuka hidup dalam pengaruh budaya lokal yang masih lestari sampai saat ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan pemaknaan prinsip dan praktik akuntabilitas dari nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini juga ingin mengangkat secara natural praktik akuntabilitas apa adanya dalam suatu daerah atau organisasi serta Gereja yang hidup dalam pengaruh kekuatan nilai-nilai budaya lokal (Randa, 2011).

Memahami tata kelola gereja Katolik yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional menjadi penting karena nilai-nilai budaya lokal kaya akan makna yang dapat mendukung pencapaian akuntabilitas gereja. Nilai-nilai budaya lokal yang diserap oleh Gereja Katolik diharapkan dapat mengiring Gereja Katolik berkembang menjadi gereja yang membudaya dalam aspek religius dan tata kelola organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Hasil pemaknaan dari nilai budaya lokal yang hidup dalam gereja lokal akan menjadi dasar untuk melakukan analisis pemaknaan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Pendekatan pada bingkai

inkulturasi nilai-nilai budaya lokal masyarakat digunakan untuk menemukan prinsip akuntabilitas yang lebih dekat dengan Gereja Katolik lokal.

Nilai dari budaya lokal pada gereja Katolik di Larantuka yang terinkulturasi dengan nilai-nilai kekatolikan Gereja yang selama ini dipandang bersifat sentralistik diharapkan menjadi lebih transparan karena umat Larantuka yang telah lebih dulu hidup dalam budayanya dilibatkan dalam setiap kegiatan hidup menggereja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mengetahui makna prinsip akuntabilitas gereja serta pengelolaan keuangan gereja Katolik lokal di Larantuka yang terinkulturasi dengan budaya lokal setempat, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa makna prinsip akuntabilitas dalam gereja Katolik lokal di Larantuka?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Gereja Katolik lokal di Larantuka?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini prinsip akuntabilitas hanya dibatasi pada:

1. Akuntabilitas kepemimpinan pada gereja Katolik lokal setempat

Dalam Randa (2011) akuntabilitas kepemimpinan adalah bentuk kepemimpinan yang berusaha mengedepankan unsur pelayanan yang menjadi perwujudan dari model kepemimpinan Sang Kristus tokoh sentral dalam Gereja (Randa, 2011).

2. Akuntabilitas keuangan pada gereja Katolik lokal setempat

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga atau organisasi dalam menggunakan dan mengelola dana yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif (Silvia dan Ansar, 2011).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memaknai prinsip akuntabilitas yang terjadi dalam Gereja Katolik lokal di Larantuka sebagai entitas publik yang membawa misi keselamatan bagi pengikutnya melalui praktik-praktik pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Gereja Katolik di Larantuka.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam hal pengetahuan, makna serta prinsip akuntabilitas pada organisasi nirlaba, lembaga keagamaan pada umumnya dan organisasi gereja pada khususnya.

2. Kontribusi Praktik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktik bagi pengelolaan keuangan Keuskupan, Paroki, dan Stasi untuk merumuskan sistem dan mekanisme tata kelola keuangan organisasi agama sehingga prinsip akuntabilitas yang transparan dan akuntabel dapat terwujud pada tubuh lembaga keagamaan pada umumnya dan Gereja Katolik pada khususnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivis dengan metode etnografi yang dapat mengangkat bentuk praktik akuntabilitas apa adanya dalam suatu daerah atau organisasi. Penelitian akuntansi dengan menggunakan paradigma interpretivis bertujuan memahami fenomena akuntansi atau praktik akuntansi dari sudut pandang pelaku, seperti seorang akuntan, auditor, dan lain sebagainya. Menurut Burrell dan Morgan (1979) dan Chua (1986) dalam Triyuwono (2013) penelitian yang dilakukan dalam wilayah paradigma interpretivis bertujuan untuk menafsirkan (*to interpret*) dan memahami (*to understand*) fenomena akuntansi. Bagi paradigma ini, akuntansi merupakan representasi dari sebuah realitas. Dengan kata lain, realitas akuntansi direpresentasikan dalam bentuk simbol.

Metode etnografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi baru yang diperbaharui oleh antropologi kognitif kedua, antara lain James Spradley. Spradley mendefinisikan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka, dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka (Spradley, 1997). Metode etnografi ini disebut *Development Research Sequence* atau "Alur Penelitian Maju Bertahap". Metode ini didasarkan pada lima prinsip yaitu, teknik tunggal, identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal, dan *problem solving* (Spradley, 1997).

Dalam Spradley (1997) kelima prinsip penelitian etnografi dibagi menjadi dua belas langkah yaitu memilih informan, mewawancarai seorang informan, membuat catatan etnografis yang akan menjadi bahan analisis lebih lanjut, mengajukan pertanyaan deskriptif, melakukan analisis wawancara, membuat analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen, menemukan tema budaya, dan menulis sebuah etnografi. Dalam penelitian yang ini, kedua belas tahapan tersebut tidak semuanya digunakan. Penggunaan tahapan-tahapan bergantung pada ketersediaan dan ketertarikan informasi.

1.6.2. Objek Penelitian

Objek merupakan suatu entitas yang akan diteliti. Objek dapat berupa perusahaan, manusia, karyawan, dan lainnya (Hartono, 2017). Objek penelitian

dalam penelitian etnografi diistilahkan dengan informan. Informan merupakan pembicara asli yang diminta oleh peneliti berbicara dalam bahasa dan dialeknya sendiri dan sering menjadi contoh berbicara oleh peneliti (Randa, 2011). Objek penelitian etnografi ini terdiri dari informan kunci yang menjadi wakil masing-masing organisasi objek penelitian yaitu para tokoh umat, budayawan Larantuka, Pastor Paroki, Bendahara Paroki, Bendahara Kapela, dan Romo Ekonom Keuskupan Larantuka.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada paroki yang berada di bawah Keuskupan Larantuka yaitu Paroki San Juan yang terletak di Lebao Tengah dan Kapela Tuan Meninu yang terletak di lingkungan Kota Rowido.

1.6.4. Sumber Data Penelitian

Data-data yang didapatkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum gereja, struktur organisasi, dan *job description*
2. Laporan keuangan keuskupan dan paroki
3. Catatan lain yang dibuat oleh keuskupan dan gereja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
4. Formulir, dokumen, dan catatan yang digunakan oleh gereja lokal setempat.

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah:

1. Wawancara
2. Observasi

1.6.6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan hasil catatan etnografi yang telah dikumpulkan melalui wawancara di lapangan. Tahapan analisis data meliputi:

1. Mendeskripsikan makna prinsip akuntabilitas kepemimpinan dan keuangan yang meliputi unsur-unsur dasar dan mekanisme yang diterapkan oleh Keuskupan Larantuka, Paroki San Juan, dan Kapela Tuan Meninu yang menjalankan tradisi-tradisi keagamaan Katolik serta mengidentifikasi praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh kapela, paroki, dan keuskupan.
2. Membandingkan praktik pengelolaan keuangan yang telah dijalankan oleh paroki dan keuskupan dengan teori atau pedoman yang ada pada PSAK No. 45.
3. Membuat kesimpulan atas hasil pemaknaan prinsip akuntabilitas pada Keuskupan Larantuka, Paroki San Juan, dan Kapela Tuan Meninu yang berakar pada kebudayaan Suku Lamaholot.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Paroki

Bab ini membahas dasar-dasar teori penelitian ini tentang pengertian organisasi sektor publik, akuntabilitas, keuangan dan akuntansi Gereja Katolik, pengelolaan keuangan Paroki.

BAB III : Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran umum Keuskupan Larantuka, Paroki San Juan, yang terdiri dari sejarah Paroki, struktur organisasi Dewan Paroki, praktik akuntabilitas Keuskupan Larantuka, praktik akuntabilitas Paroki San Juan, pengelolaan keuangan Keuskupan Larantuka, Paroki San Juan, dan Kapela.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas tentang makna prinsip akuntabilitas kepemimpinan dan keuangan organisasi gereja mulai dari tingkat stasi, Paroki, dan Keuskupan, identifikasi prosedur pengelolaan keuangan pada tingkat Stasi, Paroki, dan Keuskupan, deskripsi prinsip akuntabilitas pada Keuskupan Larantuka, Paroki San Juan,

dan Kapela Tuan Meninu yang berakar pada kebudayaan suku Lamaholot

BAB V : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.

